



▶ PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

# Ribuan Pekerja Diusulkan Terima JKK-JKm

**BANTUL**—Sebanyak 2.600 pekerja berisiko tinggi diusulkan menerima dana perlindungan sosial dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Kiki Luqman  
kiki.luqman@harianjogja.com

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Mujahid mengatakan pengusulan itu dilakukan sebagai upaya dinasnya melindungi masyarakat dari golongan

▶ Dana JKK dan JKm yang diusulkan Pemkab Bantul pada perubahan APBD Bantul 2025 adalah sebesar Rp180 juta.

▶ Sebagian besar penduduk dengan kondisi ekonomi rendah di Bantul dinilai lebih mengutamakan kebutuhan pokok harian.

miskin ekstrem yang bekerja di sektor berisiko dengan mengajukan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Dia mengatakan pengajuan program ini dilakukan karena hingga saat ini

masih banyak warga miskin yang belum memiliki perlindungan kerja meski sehari-hari bergelut di pekerjaan dengan risiko tinggi.

Rencananya, perlindungan JKK dan JKm tersebut akan dialokasikan untuk sekitar 2.600 orang selama empat bulan, mulai Agustus-Desember 2025, dengan total anggaran mencapai Rp180 juta. "Dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] Bantul 2025 kami mengajukan untuk masyarakat yang berprofesi risiko tinggi dan dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Misalnya, untuk masyarakat yang bekerja sebagai penderes kelapa dan lainnya," kata Mujahid, Kamis (17/7).

Jika nantinya program ini berjalan, Disnakertrans Bantul juga berencana menyiapkan pengajuan lanjutan agar perlindungan serupa bisa diberikan selama satu tahun penuh pada 2026.

Saat ini, Disnakertrans masih berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial, pemerintah kalurahan, hingga pedukuhan, guna memverifikasi siapa saja warga yang layak mendapatkan bantuan JKK dan JKm tersebut. "Pada 2026 kemungkinan kami anggarkan sekitar Rp550 juta. Karena ini lebih kepada kepedulian kami saat melihat masyarakat di desil satu itu banyak yang punya pekerjaan risiko tinggi, tapi belum ter-cover JKK dan JKm," ucap Mujahid.

Dia menambahkan, rendahnya kepemilikan JKK dan JKm di kalangan warga miskin ekstrem ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu minimnya kesadaran akan pentingnya perlindungan keselamatan kerja dan ketiadaan dana untuk membayar iuran.

Pasalnya, sebagian besar penduduk dengan kondisi ekonomi rendah lebih mengutamakan kebutuhan pokok harian. "Jadi mungkin nanti kami menggelar sosialisasi atau sebagainya untuk memberikan pemahaman terkait dengan manfaat JKK dan JKm. Kami akan membahas rencana ke depan, apakah pengadaan pemberian JKK dan JKm ini bisa diteruskan atau sebaliknya," ujar Mujahid.